



Visi Misi

VISI

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".

(RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018).

MISI

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

(RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018).

Lamandau
Tersenyum



LKIP KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017



*Lamandau
Tersenyum*



KATA PENGANTAR

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2016 dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2016 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

Laporan kinerja juga adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah bentuk manifestasi dari kehadiran pemerintahan dalam pembangunan yang menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat dan mengartikulasikan menghadirkan *clean government and good governance* melalui formulasi, implementasi maupun monitoring dan evaluasi setiap kebijakan pembangunan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Lamandau Tahun 2016, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Nanga Bulik, Maret 2017

BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN, M.A.P.



*Lamandau
Terseenyum*



IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013–2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Visi Kabupaten Lamandau yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa". Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) misi yang akan dicapai secara bertahap selama lima tahun, sebagai berikut :

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.



7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2016 ditetapkan 31 sasaran dengan 61 indikator dan mengacu pada 10 (sepuluh) misi yang ingin diwujudkan pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Misi pertama terdiri dari 5 sasaran dengan 15 indikator sasaran

Misi kedua terdiri dari 4 sasaran dengan 14 indikator sasaran

Misi ketiga terdiri dari 3 sasaran dengan 6 indikator sasaran

Misi keempat terdiri dari 3 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi kelima terdiri dari 5 sasaran dengan 9 indikator sasaran

Misi keenam terdiri dari 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran

Misi ketujuh terdiri dari 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran

Misi kedelapan terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi sembilan terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi kesepuluh terdiri dari 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran

Capaian sasaran pada misi pertama sebesar 126,14% dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi kedua sebesar 80,87% dengan kategori berhasil, Capaian sasaran misi ketiga sebesar 122,30% dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi keempat sebesar 93,92% dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi kelima sebesar 91,75 % dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi keenam sebesar 26,49 % dengan kategori Tidak Berhasil, Capaian sasaran misi ketujuh sebesar 110,20% dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi kedelapan sebesar 115,50% dengan kategori sangat berhasil, Capaian sasaran misi kesembilan sebesar 317,50% dengan kategori kurang berhasil, Capaian sasaran misi kesepuluh sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 menunjukkan bahwa **rata – rata pencapaian kinerja adalah 116,01% yang dikategorikan "Sangat Berhasil"**.



*Lamandau
Terseenyum*



DAFTAR ISI/ TABEL

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Bidang Kewenangan	5
1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	6
1.4 Aspek Strategik Kabupaten Lamandau	8
1.5 Struktur Organisasi	16
1.6 Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Visi dan Misi Kabupaten Lamandau	20
A. Visi	20
B. Misi	22
2.3 Tujuan dan Sasaran	23
A. Tujuan	23
B. Sasaran	23
2.4 Perjanjian Kinerja	37



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Pengukuran Kinerja	42
B.	Metode Pengukuran Kinerja	43
C.	Hasil Pengukuran Kinerja	43
D.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	45
E.	Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	48
	a) Belanja	91
	b) Pembiayaan	92

BAB IV	PENUTUP	95
---------------	----------------------	-----------





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.....	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamandau.....	24
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator.....	29
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kabupaten Lamandau Tahun 2016.....	37
Tabel 3.1	Sasaran Strategis, Daftar Capaian dengan Kategori Capaian Tahun 2016.....	45
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.....	48
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	50
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.....	50
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	51
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3.....	52
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	53
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.....	53
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	54
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5.....	55
Tabel 3.11	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	56
Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6.....	57
Tabel 3.13	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	59
Tabel 3.14	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	59
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7.....	61
Tabel 3.16	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8.....	62
Tabel 3.17	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9.....	63
Tabel 3.18	Organisasi-organisasi kepemudaan yang dibina.....	64
Tabel 3.19	Organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Lamandau.....	64



Tabel 3.20	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10.....	64
Tabel 3.21	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2016.....	66
Tabel 3.22	Jumlah Tenaga Keperawatan di Sarana Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2016.....	67
Tabel 3.23	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11.....	67
Tabel 3.24	Evaluasi Pencapaian Sasaran 12.....	68
Tabel 3.25	Evaluasi Pencapaian Sasaran 13.....	70
Tabel 3.26	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14.....	72
Tabel 3.27	Evaluasi Pencapaian Sasaran 15.....	73
Tabel 3.28	Evaluasi Pencapaian Sasaran 16.....	74
Tabel 3.29	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	75
Tabel 3.30	Evaluasi Pencapaian Sasaran 17.....	76
Tabel 3.31	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016	77
Tabel 3.32	Evaluasi Pencapaian Sasaran 18.....	77
Tabel 3.33	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016	79
Tabel 3.34	Evaluasi Pencapaian Sasaran 19.....	80
Tabel 3.35	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2016.....	81
Tabel 3.36	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016	81
Tabel 3.37	Evaluasi Pencapaian Sasaran 21.....	82
Tabel 3.38	Evaluasi Pencapaian Sasaran 22.....	82
Tabel 3.39	Evaluasi Pencapaian Sasaran 23.....	83
Tabel 3.40	Evaluasi Pencapaian Sasaran 24.....	84
Tabel 3.41	Evaluasi Pencapaian Sasaran 25.....	84
Tabel 3.42	Evaluasi Pencapaian Sasaran 26.....	85



Tabel 3.43	Evaluasi Pencapaian Sasaran 27.....	86
Tabel 3.44	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	86
Tabel 3.45	Evaluasi Pencapaian Sasaran 28.....	87
Tabel 3.46	Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016.....	88
Tabel 3.47	Evaluasi Pencapaian Sasaran 29.....	88
Tabel 3.48	Evaluasi Pencapaian Sasaran 30.....	89
Tabel 3.49	Evaluasi Pencapaian Sasaran 31.....	90
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Lamandau Tahun 2016.....	92
Tabel 3.51	Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2016....	94

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Kabupaten Lamandau Tahun 2016





*Lamandau
Tersenyum*



**BAB I
PENDAHULUAN**

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.



Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.



Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, penyusunan LKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2016.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :



1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018.

1.2 Bidang Kewenangan

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;



- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.



1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.



Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kabupaten Lamandau.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena perumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. *Demand* yang diikuti *purchasing power*, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah.

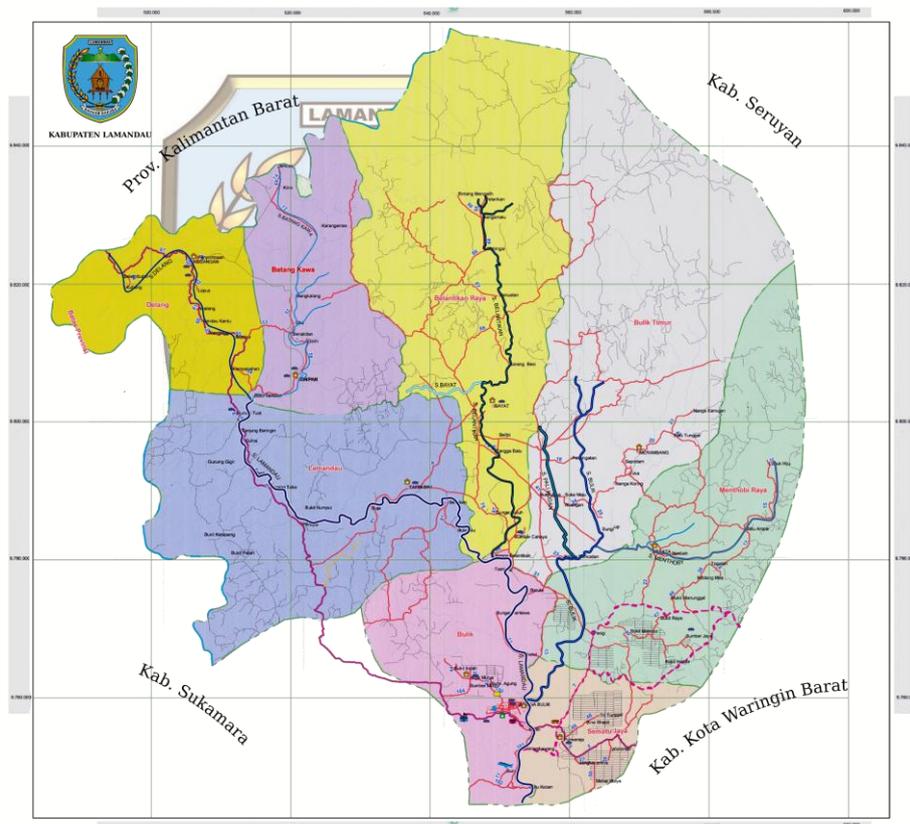
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 berjalan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lamandau sebesar 6,74.



1.4 Aspek Strategik Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Kabupaten Lamandau



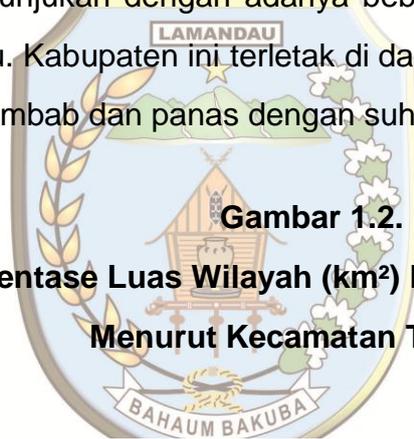
Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9 s.d. 3°36 Lintang selatan dan 110°25 s/d 112°50 Bujur Timur dan secara administratif batas wilayah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan; Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

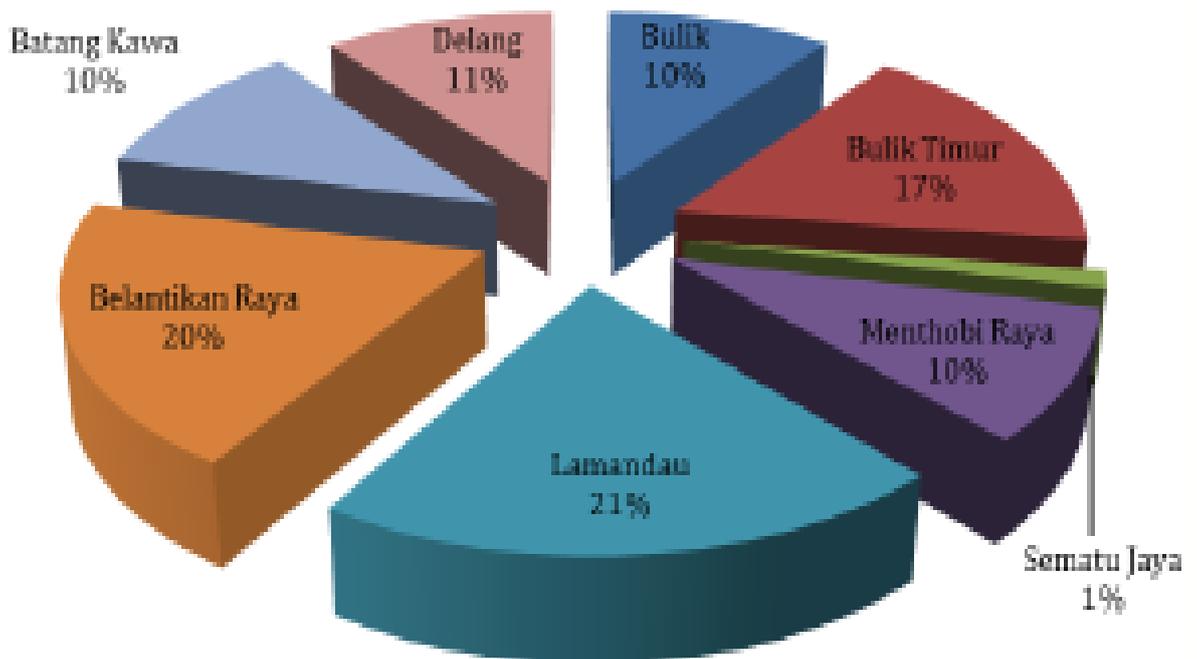


2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Ketinggian dari permukaan laut pada wilayah Kabupaten Lamandau berkisar antara 25 sampai dengan 500 meter yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau merupakan daerah pada kawasan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kabupaten ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga termasuk beriklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu rata – rata 27,480 C.



Gambar 1.2.
**Persentase Luas Wilayah (km²) Kabupaten Lamandau
Menurut Kecamatan Tahun 2016**





Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km² yang dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu :

- Kecamatan Bulik dengan luas wilayah : 665,55 Km²
- Kecamatan Bulik Timur dengan luas wilayah : 1.074,72 Km²
- Kecamatan Mentohi Raya dengan luas wilayah : 86,85 Km²
- Kecamatan Sematu Jaya dengan luas wilayah : 620,88 Km²
- Kecamatan Lamandau dengan luas wilayah : 1.333,00 Km²
- Kecamatan Belantikan Raya dengan luas wilayah : 1.263,00 Km²
- Kecamatan Batang Kawa dengan luas wilayah : 685,00 Km²
- Kecamatan Delang dengan luas wilayah : 685,00 Km²

Berdasarkan kondisi lahan luas wilayah 6.414 Km² terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari :

- Pertanian tanaman pangan : 11.100 Ha
- Perkebunan : 17.468 Ha
- Kehutanan : 585.292 Ha
- Perumahan/Danau/Sungai/Rawa : 23.900 Ha
- Hutan Tanaman Industri : 3.640 Ha

Berdasarkan Pembagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang semula terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Delang), 3 (tiga) Kelurahan, dan 79 Desa, pada tahun 2005, 3 (tiga) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa.



Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi pembentukan desa yang berada di tiga Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Hulu Jajabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Jaya. Saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Lamandau hingga saat ini berjumlah 85 desa dan 3 kelurahan.

Tabel 1.1
Jumlah dan Luas wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
1	Bulik		665,55	Kec. Induk	
		1	Nanga Bulik	75,02	Kelurahan
		2	Kujan	30,10	Desa
		3	Guci	103,00	Desa
		4	Batu Kotam	61,58	Desa
		5	Bumi Agung	8,20	Desa
		6	Sumber Mulya	7,25	Desa
		7	Bukit Indah	15,00	Desa
		8	Arga Mulya	21,50	Desa
		9	Bunut	108,00	Desa
		10	Sungai Mentawa	103,00	Desa
		11	Beruta	18,40	Desa
		12	Tamiang	108,00	Desa
		13	Perigi Raya	3,00	Desa
14	Nanga Pamalontian	3,50	Desa		
2	Lamandau		1.333,00	Kec. Induk	
		1	Tapin Bini	174,90	Kelurahan
		2	Kawa	163,00	Desa
		3	Penopa	125,00	Desa
		4	Suja	185,00	Desa
		5	Sekoban	144,00	Desa
		6	Bakonsu	91,00	Desa
		7	Cuhai	142,00	Desa
		8	Karang Taba	142,00	Desa
		9	Tanjung Beringin	82,00	Desa
		10	Sungai Tuat	76,00	Desa
11	Samu Jaya	8,10	Desa		



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
3	Delang		685,00	Kec. Induk	
		1	Kudangan	67,00	Kelurahan
		2	Sepoyu	111,00	Desa
		3	Riam Tinggi	43,00	Desa
		4	Landau Kantu	35,00	Desa
		5	Nyalang	95,00	Desa
		6	Lopus	36,00	Desa
		7	Kubung	36,00	Desa
		8	Sekombulan	60,00	Desa
		9	Riam Penahan	101,00	Desa
		10	Penyombaan	90,00	Desa
		11	Hulu Jojabo	11,00	Desa
4	Bulik Timur		1.074,72	Kec. Pemekaran	
		1	Merambang	112,00	Desa
		2	Batu Tunggai	105,00	Desa
		3	Nanga Kemujan	101,00	Desa
		4	Sepondam	98,00	Desa
		5	Toka	107,00	Desa
		6	Nanga Koring	104,00	Desa
		7	Sungkup	111,00	Desa
		8	Nanga Palikodan	105,00	Desa
		9	Nuangan	103,00	Desa
		10	Pedongatan	108,00	Desa
		11	Suka Maju	8,00	Desa
		12	Bukit Jaya	12,72	Desa
5	Batang Kawa		685,00	Kec. Pemekaran	
		1	Kinipan	54,00	Desa
		2	Ginih	61,00	Desa
		3	Batu Tambun	85,00	Desa
		4	Benakitan	80,00	Desa
		5	Liku	85,00	Desa
		6	Mengkalang	65,00	Desa
		7	Karang Mas	105,00	Desa
		8	Kina	116,00	Desa
		9	Jemuat	34,00	Desa



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KETERANGAN	
6	Menthobi Raya		620,88	Kec. Pemekaran	
		1	Melata	110,00	Desa
		2	Nanuah	102,00	Desa
		3	Topalan	44,00	Desa
		4	Batu Ampar	94,00	Desa
		5	Lubuk Hiju	123,00	Desa
		6	Bukit Makmur	7,00	Desa
		7	Bukit Raya	60,00	Desa
		8	Modang Mas	27,25	Desa
		9	Mukti Manunggal	21,63	Desa
		10	Sumber Jaya	15,00	Desa
		11	Bukit Harum	17,00	Desa
7	Sematu Jaya		86,85	Kec. Pemekaran	
		1	Purwareja	25,40	Desa
		2	Bina Bhakti	6,50	Desa
		3	Tri Tunggal	8,00	Desa
		4	Jangkar Prima	14,00	Desa
		5	Mekar Mulya	9,95	Desa
		6	Wonorejo	8,00	Desa
		7	Batu Hambawang	15,00	Desa
		8	Rimba Jaya	29,00	Desa
8	Belantikan Raya		1.263,00	Kec. Pemekaran	
		1	Bayat	99,00	Desa
		2	Nanga Belantikan	93,00	Desa
		3	Sungai Buluh	53,00	Desa
		4	Belibi	70,00	Desa
		5	Karang Besi	124,00	Desa
		6	Benuatan	103,00	Desa
		7	Kahingai	82,00	Desa
		8	Nanga Matu	114,00	Desa
		9	Petarikan	228,00	Desa
		10	Sumber Cahaya	8,00	Desa
		11	Bintang Mengalih	196,00	Desa
		12	Tangga Batu	93,00	Desa



Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau.

Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0-25%. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa. Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Ketinggian wilayah bervariasi antara 25 - 500 meter dari permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya potensi bahan tambang seperti bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 Ha tercatat 120.242 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara antara 23^o-32^oC dengan suhu rata-rata 27,48^oC, dengan suhu maksimum berkisar antara 31^o-33^oC dan minimum antara 21,9^o-23,4^oC. Kelembaban udara berkisar antara 81%-89%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4-0,7 knot.

Semua potensi yang ada di tersebut diharapkan mampu menjadi modal dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamandau melalui program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kesejahteraan masyarakat. Prioritas program pembangunan diharapkan mampu merefleksikan sinergisitas pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Lamandau dirumuskan ke dalam 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat

Strategi pembangunan kesejahteraan masyarakat mencakup upaya pembangunan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

2. Aspek tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN

Strategi pembangunan aspek tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN mencakup upaya pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

3. Aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Strategi pembangunan aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mencakup upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.



1.5 Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan haruslah kokoh, dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 26 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamandau terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau ;
2. Sekretaris Daerah;
3. Tiga Asisten Daerah, yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan 4 bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang membawahkan 3 bagian yaitu Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan dan Asisten Administrasi Umum yang membawahkan 4 bagian yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan;
4. Lima Staf Ahli yaitu Bidang Hukum, Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembangunan dan Bidang Ekonomi dan Keuangan.



5. Dua Belas Lembaga Teknis terdiri dari Inspektorat Kabupaten Lamandau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lamandau, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Empat Belas Dinas terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
7. Satu UPTD yaitu Unit Pelayanan Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau;
8. RSUD Lamandau;
9. Dua BUMD terdiri dari PDAM Tirta Darma dan BUMD Bajurung Raya;
10. Delapan Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Bulik, Kantor Kecamatan Lamandau, Kantor Kecamatan Delang, Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kantor Kecamatan Menthobi Raya, Kantor Kecamatan Bulik Timur, Kantor Kecamatan Belantikan Raya dan Kantor Kecamatan Batang Kawa;
11. Sekretariat DPRD.



Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Jumlah aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamandau untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 2.745 orang yang terdiri dari :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi golongan :

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| 1) Golongan I | : | 24 orang |
| 2) Golongan II | : | 856 orang |
| 3) Golongan III | : | 1.527 orang |
| 4) Golongan IV | : | 338 orang |

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi tingkat pendidikan :

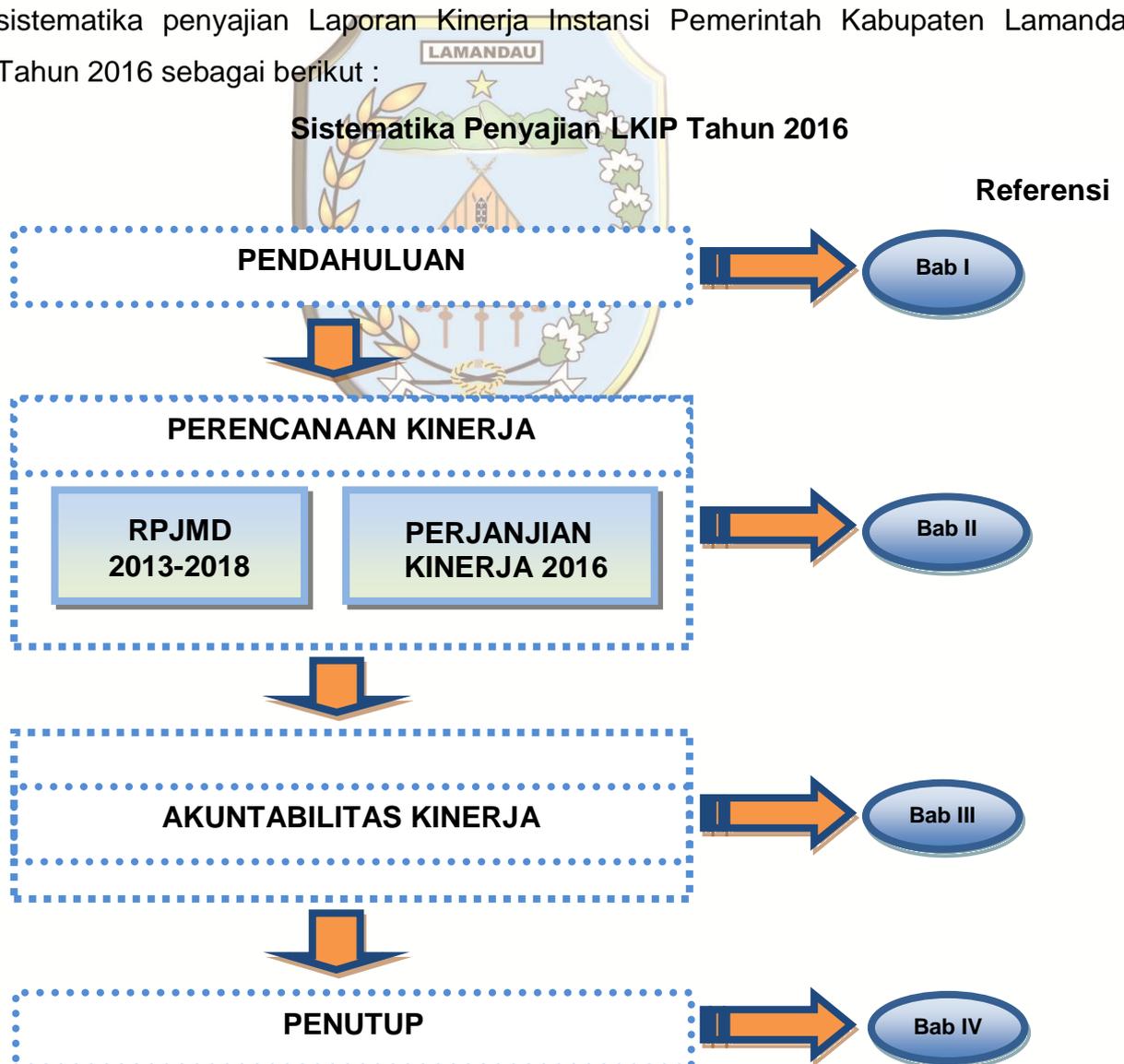
- | | | |
|---------|---|-------------|
| 1) SD | : | 20 orang |
| 2) SLTP | : | 22 orang |
| 3) SLTA | : | 642 orang |
| 4) D-1 | : | 1 orang |
| 5) D-2 | : | 217 orang |
| 6) D-3 | : | 390 orang |
| 7) D-IV | : | 47 orang |
| 8) S-1 | : | 1.317 orang |
| 9) S-2 | : | 87 orang |
| 10) S-3 | : | 2 orang |



1.6 Sistematika Penyajian

LKIP Kabupaten Lamandau Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2016 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan asumsi seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 sebagai berikut :





*Lamandau
Tersenyum*



BAB II PERENCANAAN KINERJA

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dilakukan agar instansi pemerintah lebih dapat menjelaskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut merupakan perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna perwujudan SAKIP diatas, sesuai dengan motto "***Bahaum Bakuba***" Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menetapkan Rencana Strategis secara sistematis untuk periode waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018.

2.2. VISI DAN MISI KABUPATEN LAMANDAU

A. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, yaitu :
"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA".



Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN, adalah pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.



Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi Jangka Panjang Pembangunan Nasional.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam delapan Misi yang menjadi pedoman aparat Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan aktivitas dan interaksinya melalui aktualisasi program-program yang ditetapkan. Misi dalam RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- MISI 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
- MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
- MISI 3 : Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
- MISI 4 : Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
- MISI 5 : Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
- MISI 6 : Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
- MISI 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.



- MISI 8 : Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- MISI 9 : Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
- MISI 10 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan pada rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu dan sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.



Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran akan diperlihatkan di tabel 2.1.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamandau

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
1	Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.
			2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
		Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.	3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.
			4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha.
			5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.



No.	Misi	Tujuan	Sasaran		
1	2	3	4		
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.		6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.
				7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.
				8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat - obatan terlarang lainnya.
				9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara
3	Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	
			11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	
			12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	
		Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan.			



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
4	Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.	Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dalam berbangsa dan bernegara.
			14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.
			15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat
5	Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.	16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
			17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.
			18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
			19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
		Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.
			22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			24	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
			25	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.	26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
8	Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.
			28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
9	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata
			30	Meningkatnya jumlah wisatawan
10	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa ada 31 sasaran yang dibuat dari visi, misi, dan tujuan. Berikutnya sasaran tersebut akan diberikan suatu indikator yang terukur dan dapat dihitung. Pencapaian keberhasilan suatu sasaran dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator tersebut.

Keterkaitan dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator akan diperlihatkan di tabel 2.2. sebagai berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
1	2	3	4	5	6	7
1	Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Karet (ton/ha/tahun)	1,40	1,80
				Kelapa Sawit (ton/ha/tahun)	16	26
				Jengkol (ton/ha/tahun)	175	185
				Kopi (ton/ha/tahun)	0,2	0,6
				Gaharu (ton/ha/tahun)	0,1	0,6
				2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama:	
			Beras (ton/tahun)		15.574,37	21.218,45
			Daging (ton/tahun)		689,76	875,18
			Telur (kg/tahun)		36.782	41.818
				Ikan (ton/tahun)	1.612	2.174,87



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	
		Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.	3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif	84	92
					Usaha Mikro dan Kecil	1.629	2.025
			4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	15	28
					Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/PMA) (Trilyun Rp)	2,065	2,581
			5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Angka partisipasi angkatan kerja (orang)	41.220	66.387
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	4,46	3,65					
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	Angka Partisipasi Murni		
					- SD/MI	100	100
					- SMP/MTS	100	100
					- SMA/SMK/MA	48,72	50,72
					Angka Partisipasi Kasar		
					- SD/MI	118,42	119,22
- SMP/MTS	109,19	110,09					
- SMA/SMK/MA	65	67					



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	
				Angka rata-rata lama sekolah	7,7	8,7	
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,57	90,50	
				Rasio Guru terhadap murid			
				- SD/MI	1 : 13	1 : 23	
				- SMP/MTS	1 : 14	1 : 24	
				- SMA/SMK/MA	1 : 13	1 : 23	
			7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	15
			8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Kasus narkoba (%)	2	1
			9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Jumlah Organisasi pemuda	20	26



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	
3	Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,22	0,50
					Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,94	2,11
		Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan	11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	67,36	68,30
					Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	23,27	32
						Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	5
Rasio akseptor KB (%)	45	70					
4	Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.	Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	Persentase penegakan Perda	100	100
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	
			14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (%)	50	85,7
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	75	85
					15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (keg)
5	Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	408,75	495,37
					Jumlah Terminal angkutan darat	1	2
					Jumlah bandar udara	0	1
					Angkutan Darat	23.301	37.526
			17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,48	1 : 1,43



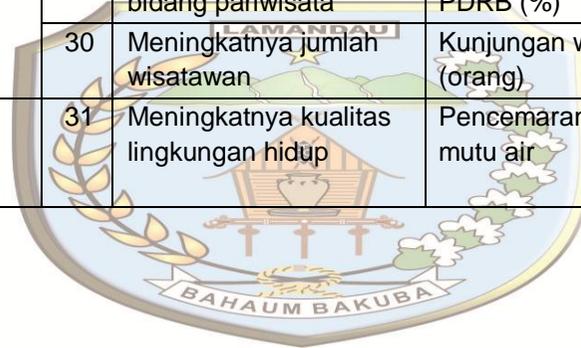
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
1	2	3	4	5	6	7
			18 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	45,61	59
				Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	31,62	46,45
				Rumah Tangga bersanitasi (%)	31,56	48,21
			19 Meningkatkan partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Partisipasi swasta dalam pembangunan (%)	80	85
		Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	20 Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	94	94
			21 Meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	12
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas				



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
1	2	3	4		5	6	7
	aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.	seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Jumah kegiatan olahraga	30	40
					Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	10
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa,	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan nilai LAKIP	20	32
			24	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Peningkatan Opini BPK	WDP	WTP
			25	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Golongan dan Jabatan yang sesuai (orang)	149	441
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.	26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	Tingkat IKM persen	70,02	80
8	Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Angka kriminalitas	111	84



NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
1	2	3	4		5	6	7
	ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.		28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Cakupan Rumah Ibadah dalam kondisi baik	256	275
9	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0	3
			30	Meningkatnya jumlah wisatawan	Kunjungan wisata (orang)	145	340
10	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pencemaran status mutu air	70	90





2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Lamandau
Tahun 2016

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan	
		Karet	1,6 ton/ha/thn
		Kelapa Sawit	23 ton/ha/thn
		Jengkol	180 ton/ha/thn
		Kopi	0,4 ton/ha/thn
Gaharu	0,3 ton/ha/thn		



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama	
		Beras	18.647,82 ton/thn
		Daging	795,55 ton/thn
		Telur	4.057 kg/thn
		Ikan	2.013,38 ton/thn
3.	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Persentase Koperasi Aktif	88%
		Usaha Mikro dan Kecil	2.000 UMK
4.	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 Perusahaan
		Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 2.374 Trilyun
5.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Angka partisipasi angkatan kerja	54.863 Orang
		Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	3,91%
6.	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	Angka Partisipasi Murni	
		SD/MI	100%
		SMP/MTS	100%
		SMA/SMK/MA	50,32%
		Angka Partisipasi Kasar	
		SD/MI	118,82%
		SMP/MTS	109,79%
		SMA/SMK/MA	65,60%
		Angka rata-rata lama sekolah	8,3%
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	70,40%
		Rasio Guru terhadap murid	
		SD/MI	1 : 19
		SMP/MTS	1 : 20
SMA/SMK/MA	1 : 19		



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	13 Keg
8.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psiktropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Kasus Narkoba	1%
9.	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Jumlah Organisasi Pemuda	24%
10.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,39
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	2,11
11.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Angka Usia Harapan Hidup	68,1 Tahun
12.	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	30%
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	1%
		Rasio Akseptor KB	60%
13.	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	Persentase Penegakan Perda	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	100%
14.	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	76,9%



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80%
15.	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	24 Keg
16.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	468,75 km
		Jumlah Terminal Angkutan Darat	1 Terminal
		Angkutan Darat	28.194 Unit
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,45
18.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	52,5%
		Rumah Tangga pengguna air bersih	38,74%
		Rumah Tangga bersanitasi	42,16%
19.	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Partisipasi swasta dalam pembangunan	82%
20.	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	94%
21.	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	13 Kali
22.	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Jumlah Kegiatan Olahraga	36 Keg
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	8
23.	Meningkatnya akuntabilitas	Peningkatan Nilai LAKIP	27



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kinerja pemerintah daerah	(Indeks)	
24.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP
25.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Golongan dan Jabatan yang sesuai	323
26.	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	Tingkat IKM	76%
27.	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Angka Kriminalitas	90 Kasus
28.	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Cakupan Rumah Ibadah dalam kondisi baik	264 Unit
29.	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2%
30.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Kunjungan Wisata	65 Orang
31.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pencemaran Status Mutu Air	80%



Lamandau Tersenyum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lamandau melaksanakan kewajiban melaksanakan kinerja yang ditetapkan Tahun 2016 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang diperoleh dari pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2016. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2016 dengan menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Pemerintah Kabupaten Lamandau menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran strategis secara langsung.



Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sebagai berikut :

B. METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

C. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator hasil.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*).

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



D. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian atas 31 IKU yang diukur dengan 31 indikator capaian kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja untuk sasaran strategis Tahun 2016 dengan rata-rata capaian **116,01%** dengan kategori sangat berhasil.

Secara ringkas, capaian tersebut disajikan menurut sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Sasaran Strategis, Daftar Capaian dengan
Kategori Capaian Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	80,55	Berhasil
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	162,72	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	121,00	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	180,17	Sangat Berhasil
5.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	86,25	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	113,80	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	53,85	Tidak berhasil
8.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	110,00	Sangat Berhasil
9.	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	45,83	Tidak Berhasil
10.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	136,11	Sangat berhasil
11.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	101,49	Sangat Berhasil



NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
12.	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	129,30	Sangat berhasil
13.	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	97,98	Sangat berhasil
14.	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	87,96	Sangat berhasil
15.	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	95,83	Sangat berhasil
16.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	74,74	Berhasil
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	119,32	Sangat berhasil
18.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	80,47	Berhasil
19.	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	100,00	Sangat berhasil
20.	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	84,21	Berhasil
21.	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	30,76	Tidak berhasil
22.	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	22,22	Tidak Berhasil
23.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	89,33	Sangat berhasil
24.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	100,00	Sangat berhasil
25.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	148,61	Sangat Berhasil
26.	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	102,84	Sangat Berhasil



NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
27.	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	100,00	Sangat berhasil
28.	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	131,00	Sangat berhasil
29.	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	75,00	Berhasil
30.	Meningkatnya jumlah wisatawan	635	Sangat Berhasil
31.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,00	Sangat berhasil
Jumlah rata - rata capaian kinerja		116,01	Sangat Berhasil

Berdasarkan klasifikasi capaian atas indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara keseluruhan pada tahun 2016 dapat dikatakan bahwa pencapaiannya rata-rata sebesar **116,01 %** dan tergolong dalam kategori **Sangat berhasil**.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau secara umum telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, walaupun pada beberapa program yang belum tercapai dan perlu ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2016.

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis, capaian 2016 dengan capaian tahun sebelumnya beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.



E. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya **produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah** dengan 5 (lima) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Karet	ton/ha/tahun	1,50	1,23	82,00	1,60	1,42	89,00
2.	Kelapa Sawit	ton/ha/tahun	20	18	90,00	23	21	91,00
3.	Jengkol	ton/tahun	178	172	96,63	180	173	96,11
4.	Kopi	ton/ha/tahun	0,3	0,28	93,33	0,4	0,28	70,00
5.	Gaharu	ton/ha/tahun	0,2	0,17	85,00	0,3	0,17	56,66
Capaian Kinerja					89,39			80,55

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah sebesar **80,55%**, dengan kategori **berhasil**. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 8,84% dari capaian kinerja sebesar 89,39% dengan kategori berhasil. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran hanya 2 (dua) indikator yang tingkat capaian kerjanya masih belum optimal indikator kopi dengan capaian 70,00% dan indikator Gaharu dengan capaian 56,66,00 % dengan kategori **kurang berhasil**.

Ketidak berhasilan capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah:

1. Capaian Indikator Produksi/ Produktivitas kopi sebesar 70,00% pada kategori kurang berhasil dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 23,33 % dari capaian kinerja sebesar 93,33,00%, tidak optimalnya capaian indikator ini disebabkan karena :

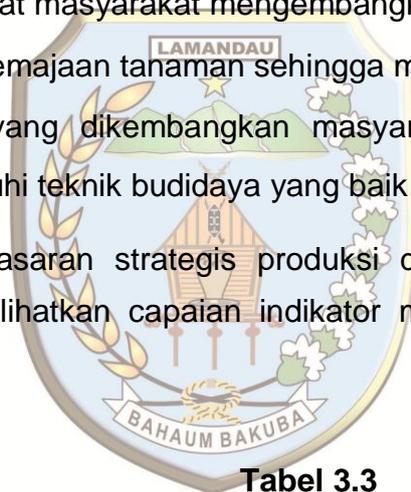


- Berkurangnya luasan tanaman kopi rakyat disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi komoditi tanaman perkebunan lainnya.
- Masih kurangnya sumber daya manusia kebun yang memahami teknis budidaya tanaman kopi.
- Terjadinya peremajaan tanaman menghasilkan sehingga menurunnya produksi.

2. Capaian Indikator Produksi/ Produktivitas Gaharu sebesar 56,66% dengan kategori cukup berhasil, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 28,34% dari capaian kinerja sebesar 85,00%, tidak optimalnya capaian indikator ini disebabkan karena:

- Kurangnya minat masyarakat mengembangkan tanaman gaharu.
- Terjadinya peremajaan tanaman sehingga menurunnya produksi.
- Bibit gaharu yang dikembangkan masyarakat masih bersifat konvensional, belum memenuhi teknik budidaya yang baik.

Pencapaian target sasaran strategis produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d.Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1.	Karet	ton/ha/tahun	1,60	1,42	89,00
2.	Kelapa Sawit	ton/ha/tahun	23	21	91,00
3.	Jengkol	ton/tahun	180	173	96,11
4.	Kopi	ton/ha/tahun	0,4	0.28	70,00
5.	Gaharu	ton/ha/tahun	0,3	0.17	56,66

Realisasi capaian indikator makro daerah terhadap komoditi unggulan daerah sebesar 80,55 % dengan kategori **berhasil** dari 5 (lima) dijumpai 3 (tiga) yaitu indikator Produksi/ Produktivitas karet, kelapa sawit dan jengkol masing – masing capaian



kinerja Produksi/ Produktivitas karet 89,00, kelapa sawit 91,00 %, dan jengkol 96,11 % sedangkan indikator Produksi/ Produktivitas kopi mencapai target 70,00 % dan gaharu mencapai target 56,66 %.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar :

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Beras	Ton/Tahun	17.519,43	15.594	89,00	18.647,82	17.400	93,31
2.	Daging	Ton/Tahun	758,55	481,02	63,41	795,55	97,32	12,23
3.	Telur	Ton/Tahun	39,746	95,77	241	40,057	169.397	422,80
4.	Ikan	Ton/Tahun	1.922,53	2.205,24	115	2.013,38	2.265,99	122,55
Capaian Kinerja					127,10			162,72

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian meningkatnya ketahanan pangan masyarakat sebesar 162,72%, dengan kategori **sangat berhasil**, Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 35,62% dari capaian kinerja sebesar 127,10% dengan kategori sangat berhasil. Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran hanya 2 (dua) indikator yang capaiannya melampaui target yaitu “Jumlah telur dan Ikan dengan capaian masing-masing 422,80% dan 122,55%, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran beras dan daging tingkat capaian indikator hanya mencapai masing-masing 93,31% dan 12,23% (dibawah 100%) dengan kategori kurang berhasil.

Keberhasilan pencapaian indikator ketersediaan pangan utama Telur 422,80% didukung oleh :

1. Adanya peningkatan intensitas dan kapasitas pembinaan serta pendampingan oleh petugas-petugas teknis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan peternak dalam penerapan teknologi peternakan tepat guna.



Program Pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja indikator ikan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian.

2. Adanya peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan berupa pembuatan kolam dan keramba.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan dan pembinaan Perikanan.

Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran daging disebabkan oleh:

- a. Akibat kenaikan harga daging di pasaran daya beli masyarakat menurun.
- b. Banyak masyarakat masih menyukai konsumsi ikan dibanding daging.

Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran beras pada umumnya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang.

Pencapaian target sasaran strategis **meningkatnya ketahanan pangan masyarakat** juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d.Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
	Ketahanan Pangan				
1.	Beras	Ton/ Tahun	18.647,82	17.400	93,31
2.	Daging	Ton/ Tahun	795,55	97,32	12,23
3.	Telur	Ton/ Tahun	40,057	169.397	422,80
4.	Ikan	Ton/ Tahun	2.013,38	2.265,99	122,55

Realisasi capaian indikator makro daerah untuk ketahanan pangan menunjukkan 2 (dua) indikator belum optimal dalam mencapai target yaitu indikator Ketersediaan beras dan daging masing-masing capaian memperoleh 93,31% dan 12,23%, sedangkan untuk telur dan ikan melampaui target masing-masing 422,80% dan 122,55%.



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Permodalan KUMKM dan IKM Berbasis Komoditi Daerah Serta Berdaya Saing

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentasi koperasi aktif	persen	86	86	100	88	80	90
2	Usaha Mikro dan kecil	jumlah	1.772	2.984	168	2.000	3.058	152
CAPAIAN KINERJA					134		121	

Berdasarkan tabel diatas untuk meningkatnya peran kelembagaan dan Permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing **sebesar 121%**, dengan kategori **sangat berhasil**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 134 % kinerja capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 13 %. Dilihat dari masing- masing tingkat capaian kinerja tahun 2016 tingkat capaian 2 (dua) indikator ini kurang optimal ada 1 (satu) indikator dibawah 100%) dengan capaian masing-masing 90 % dan 152 %. kurang optimalnya capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah:

1. Jumlah Persentasi koperasi aktif dan berjalan kurang maksimal.
2. Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang dibina memenuhi target, disebabkan karena kondisi perekonomian yang membaik sehingga menyebabkan usaha mikro dan kecil berjalan maksimal.
3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

Pencapaian target sasaran strategis **meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing** juga



memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Persentasi koperasi aktif	persen	88	80	90
2	Usaha Mikro dan kecil	jumlah	2.000	3.058	152

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan karena capaian 2 (dua) indikator yaitu indikator Jumlah Persentasi koperasi aktif dan indikator Usaha Mikro dan kecil masing – masing capaian kinerja 90 % dan 152%.



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	19	31	163,16	22	32	145,45
2	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	2.271 Trilyun	5.450	225,18	2.374 Trilyun	5.103	214,90
CAPAIAN KINERJA					194,17			180,17



Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja sebesar 180,17 %, dengan kategori **sangat berhasil**. Dibandingkan dengan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) menunjukkan penurunan sebesar 14%. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaiannya melampaui target sebesar 145,45% dan 214,90.

Keberhasilan capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan capaian sebesar 214,90% dibandingkan tahun tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) mengalami penurunan sebesar 10,28% dari capaian kinerja sebesar 225,18%, kurang optimalnya indikator ini disebabkan karena kurang maksimalnya dalam pendataan yang dilakukan serta kurangnya sosialisasi terhadap penghimpunan data LKPM.

Pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d. Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	22	32	145,45
2.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	2.374 Trilyun	5.103	214,90

Realisasi capaian indikator makro daerah melebihi target jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan capaian kinerja 145,45% atau 32 perusahaan, dari target indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 22 perusahaan.



Sasaran Strategis 5 Menurunnya tingkatnya pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	49.879	34.111	69,00	54.863	38.675	70,49
2.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	4,04	4,00	99,00	3,91	4,00	102
CAPAIAN KINERJA					84,00		86,25	

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda sebesar **86,25 %**, dengan kategori **sangat berhasil** capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 2,25% dari capaian kinerja sebesar 84,00%.

Meningkatnya capaian indikator kinerja “Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” disebabkan karena :

- Kabupaten Lamandau adalah daerah yang sedang berkembang hal ini menjadi magnet bagi pencari kerja, kondisi seperti ini akan sangat terlihat pada saat ada formasi CPNS banyak pencari kerja dari daerah lain yang mendaftar sebagai pencari kerja di Kabupaten Lamandau, yang tentunya itu sangat mempengaruhi angkatan kerja, dan ini juga akan berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Lamandau;
- Belum tentu yang mencari pekerjaan adalah pengangguran, karena bisa jadi pencari kerja yangn terdaftar sebagai pencari pencari kerja untuk pindah pekerjaan,



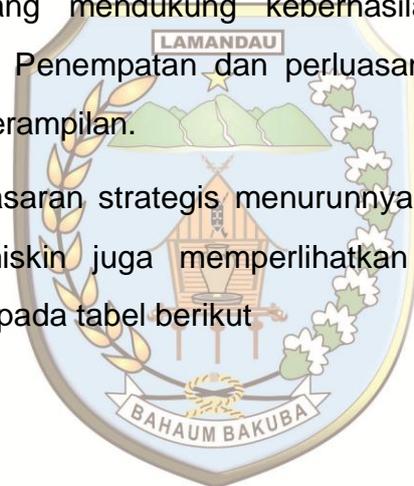
seperti contoh pada saat formasi CPNS banyak yang mendaftar tetapi sebenarnya sudah bekerja di perusahaan swasta.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang lebih bervariasi dalam arti tidak sama dengan lowongan pekerjaan yang sudah ditawarkan sebelumnya;
2. Mengarahkan para pencari kerja untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.
3. Kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan membuka Bursa Lapangan Kerja.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain Penempatan dan perluasan kesempatan kerja serta Program Pelatihan/ kursus keterampilan.

Pencapaian target sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut



Tabel 3.11
Pencapaian Indikator Makro Daerah
Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d. Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	54.863	38.675	70,49
2.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	3,91	4,00	102

Realisasi capaian indikator makro daerah untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun dari 2 (dua) indikator ini masih tingkat capaian kinerjanya belum optimal (dibawah 100%).



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan** dengan 11 (sebelas) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Angka Partisipasi Murni							
1	SD/MI	%	100	99,91	99,91	100	87,79	87,79
2	SMP/MTS	%	100	79,38	79,38	100	76,17	76,17
3	SMA/SMK/MA	%	50,12	41,94	83,68	50,32	76,51	152,02
	Angka Partisipasi Kasar							
4	SD/MI	%	118,82	98,20	82,65	118,82	100,47	84,56
5	SMP/MTS	%	109,59	80,07	73,06	109,79	102,20	93,09
6	SMA/SMK/MA	%	65,40	51,65	78,98	65,60	81,67	124,50
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,1	8,1	100,00	8,3	8,1	97,59
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	60,20	64,56	107,24	70,40	75,38	107,07
	Rasio Guru terhadap murid							
9	SD/MI	Rasio	1 : 17	1 : 12	170,00	1 : 19	1 : 14	135,71
10	SMP/MTS	Rasio	1 : 18	1 : 9	200,00	1 : 20	1 : 12	166,67
11	SMA/SMK/MA	Rasio	1 : 17	1 : 10	158,00	1 : 19	1 : 15	126,67
Capaian Kinerja					113,29			113,80

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan **sebesar 113,80%**, dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 0,51% dari capaian kinerja sebesar 113,29%, dari 11 indikator diatas, 6 (enam) indikator memperoleh capaian kinerja melebihi target (diatas 100%) dan 5 (lima) indikator dengan realisasi dibawah target.

Tidak optimalnya capaian kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja sasaran adalah :



- Realisasi indikator kinerja APM SD/MI mencapai 87,79% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2016, dikarenakan menurunnya jumlah anak pada usia sekolah dasar untuk menempuh pendidikan dasar pada Tahun 2016. Penurunan jumlah anak pada kelompok usia 7-12 Tahun yang masuk sekolah dikarenakan masih adanya beberapa anak yang berusia 7-12 tahun yang tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu orang tua karena alasan ekonomi. Dan faktor siswa SD yang berada di luar lingkaran usia 7-12 Tahun masih cukup tinggi, masih terdapat anak usia di atas 12 Tahun masih menempuh sekolah dasar, dikarenakan anak berkebutuhan khusus dan masalah lainnya. Hal ini memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian APM SD/MI.
- Realisasi indikator kinerja APM SMP/MTs mencapai 76,17%, dari target yang ditetapkan pada Tahun 2016, dikarenakan menurunnya jumlah anak pada usia 13-15 Tahun untuk menempuh pendidikan dasar pada Tahun 2016, dengan alasan bekerja membantu ekonomi orang tua sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian APM SMP/MTs.
- Realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar SD/MI, mencapai 84,56%. Capaian kinerja ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,91% ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI berapapun usianya, yang sedang bersekolah di SD/MI terhadap jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, tahun 2016 dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 118,82 %, kondisi ini lebih baik disebabkan makin banyak siswa yang masuk sekolah dasar dikarenakan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penting pendidikan.
- Realisasi capaian indikator kinerja APK SMP/MTs sebesar 93,09% Capaian indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 20,03%, penurunan ini dikarenakan terjadi peningkatan target pada Tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian target sasaran strategis **meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan** juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.13
Pencapaian Indikator Makro Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d. Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
	Angka Partisipasi Murni				
1	SD/MI	%	100	87,79	87,79
2	SMP/MTS	%	100	76,17	76,17
3	SMA/SMK/MA	%	50,32	76,51	152,02
	Angka Partisipasi Kasar				
4	SD/MI	%	118,82	100,47	84,56
5	SMP/MTS	%	109,79	102,20	93,09
6	SMA/SMK/MA	%	65,60	81,67	124,50
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,3	8,1	97,59
8.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	70,40	75,38	107,07
	Rasio Guru terhadap murid				
9	SD/MI	Rasio	1 : 19	1 : 14	135,71
10	SMP/MTS	Rasio	1 : 20	1 : 12	166,67
11	SMA/SMK/MA	Rasio	1 : 19	1 : 15	126,67

Realisasi capaian indikator makro daerah terhadap indikator kinerja sasaran **meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan** secara keseluruhan sudah memenuhi target, namun beberapa indikator makro yang belum optimal untuk mencapai target yaitu indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SD/MI.

Tabel 3.14
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian SPM		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Rasio Guru terhadap murid				
1	SD/MI	Rasio	1 : 19	1 : 14	135,71
2	SMP/MTS	Rasio	1 : 20	1 : 12	166,67
3	SMA/SMK/MA	Rasio	1 : 19	1 : 15	126,67



Dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar terkait dengan ketersediaan jumlah guru untuk semua tingkat pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melampaui target sebagaimana pada 3 (tiga) indikator yang ditetapkan yaitu :

- Realisasi Rasio guru terhadap murid mencapai 1: 14, capaian ini dibawah dari target rasio dalam SPM minimal 1:19, kondisi ini bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga guru tingkat SD dengan beberapa program yang dilakukan antara lain memberikan tunjangan khusus, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, bantuan untuk guru bantu.
- Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa rasio guru SMP terhadap siswa minimal 1:20. Realisasi kinerja rasio guru terhadap murid SMP sesuai SPM pada tahun 2015 mencapai 200%, sedangkan capaian kinerja IKU ini pada tahun 2016 mencapai 166,67%. Penurunan ini disebabkan kurangnya jumlah pemerataan guru sesuai dengan bidang studi untuk mengajar.
- Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menyebutkan bahwa rasio guru SMA terhadap murid minimal 1:19. Realisasi kinerja rasio guru terhadap murid SMA sesuai SPM pada tahun 2015 mencapai 158 %, sedangkan capaian kinerja IKU pada tahun 2016 ini mencapai 126,67%. Peningkatan ini di dorong oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang kelas dalam skala besar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Pemikiran masyarakat yang lebih mengutamakan mencari nafkah dibandingkan dengan menuntut ilmu sulit untuk dirubah.
 - 2) Pemerataan jumlah guru sesuai dengan kebutuhan bidang studi untuk mengajar di daerah pedalaman yang masih kurang.
 - 3) Kurangnya ruang kelas yang representatif untuk melakukan proses belajar mengajar
- Beberapa langkah antisipasi ke depan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun



- 2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan agar memberikan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Penyediaan ruang kelas baru sebagai program prioritas;
- 4) Meningkatkan intervensi untuk yang tingkat capaiannya masih di bawah 100% melalui upaya peningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan antara lain ruang kelas baru dan pengembangan sekolah inklusi;
- 5) Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 6) Mengupayakan untuk pemenuhan SPM DIKDAS sebagai program prioritas.

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

- 1) Pembangunan gedung sekolah/ruang kelas baru
- 2) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
- 3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pembinaan dan Pemberdayaan generasi Muda

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	12	4	33	13	7	53,85
CAPAIAN KINERJA					33		53,85	

Berdasarkan tabel diatas, Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda kurang berhasil atau kurang dari 100%.

Keberhasilan terlihat dari Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan dan di ikuti Kabupaten Lamandau.



Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 6 kegiatan yaitu :

- Pekan Olahraga Pelajar Tingkat kabupaten;
- Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten;
- Perlombaan dalam rangka Hari Olahraga Nasional;
- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
- Pertandingan Futsal dalam rangka Hari Sumpah Pemuda; dan
- Paskibraka Tingkat Kabupaten.

Sasaran Strategis 8
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terutama generasi muda
atas bahaya minuman keras, narkoba,
psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran Masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Kasus Narkoba	Persen	1	0,011	110,00	1	0,011	110,00
Capaian Kinerja					110,00			110,00

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian meningkatnya kesadaran Masyarakat terutama generasi muda atas bahaya narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya, dengan indikator kinerja sasaran Penurunan Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya telah memenuhi target tingkat Kesadaran Masyarakat Akan bahaya Narkoba 1 %. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena Pemerintah Daerah melalui jajaran terkait aktif dalam melaksanakan sosialisasi akan bahaya narkoba bagi generasi muda.

Indikator Sasaran ini di dicapai dari indikator SKPD :



No.	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Kasus Narkoba	%	1	0,011	110,00	1	0,011	110,00
Capaian Kinerja					110,00			110,00

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian meningkatnya kesadaran Masyarakat terutama generasi muda atas bahaya narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya, dengan indikator kinerja sasaran Penurunan Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.telah memenuhi target tingkat Penurunan Penyalahgunaan Narkoba.

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah organisasi Kepemudaan	organisasi	23	10	39,13	24	11	45,83
Capaian Kinerja					39,13			45,83

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja diatas terdapat 1 (satu) indikator yang capaian Kinerjanya kurang berhasil atau kurang dari 60%, pada Indikator Jumlah organisasi Kepemudaan terjadi peningkatan dari capaian kinerja tahun 2015 sebesar 6,70% dari capaian kinerja 45,83%, ini dikarenakan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan Kurang Aktif.



Tabel 3.18
Organisasi – organisasi kepemudaan yang dibina

NO.	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT
1	KNPI	50	Nanga Bulik
2	Gamki	21	Nanga Bulik

Tabel 3.19
Organisasi – organisasi kepemudaan di Kabupaten Lamandau

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT
1	KNPI	50	Nanga Bulik
2	AMPI	7	Nanga Bulik
3	Gerakan Pemuda Ansor	20	Nanga Bulik
4	Angkatan Muda Partai Golkar	15	Nanga Bulik
5	Pemuda Muslim Indonesia	25	Nanga Bulik
6	Patayat NU	13	Nanga Bulik
7	Ikatan Pelajar NU	14	Nanga Bulik
8	Angkatan Pemuda Katolik	40	Nanga Bulik
9	Gamki	21	Nanga Bulik
10	Pemuda Pancasila	5	Nanga Bulik
11	Seksi Pelayanan Pemuda GKE	70	Nanga Bulik

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,36	0,50	138,08	0,39	0,20	51,28



2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Rasio	194	189	97,04	2,11	1,79	84,83
CAPAIAN KINERJA					118,00			136,11

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja 2016 sebesar 136,11% dengan kategori **sangat berhasil** dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) mengalami kenaikan 18,11% dari capaian indikator sebesar 118,00% dengan kategori yang sama.

Upaya untuk lebih meningkatkan indikator kinerja tersebut diatas akan ditempuh melalui beberapa program atau kegiatan :

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

RSUD Kabupaten Lamandau terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Saat ini dari seluruh ruang perawatan di RSUD Lamandau jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 65 buah. Adapun sarana dan prasarana di RSUD Kabupaten Lamandau sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Unit Rawat Jalan :
 - a. Poliklinik umum
 - b. Poliklinik spesialis penyakit dalam
 - c. Poliklinik spesialis anak
 - d. Poliklinik kebidanan dan kandungan
 - e. Poliklinik spesialis bedah
 - f. Klinik gizi
 - g. Poliklinik gigi
- IGD
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IRD) 24 jam
 - b. Dokter jaga 24 jam (dokter umum yang telah mengikuti ATLS)



- Rawat Inap

- a. VIP
- b. Kelas 1
- c. Kelas 2 (sudah dibangun tetapi belum beroperasi)
- d. Kelas 3 terdiri dari :
 - 1) Zaal umum
 - 2) Zaal Bedah
 - 3) Zaal Isolasi
 - 4) Zaal Anak
- e. Instalasi kebidanan dan perawatan bayi

Adapun jumlah tenaga dokter di Kabupaten Lamandau tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan
Kabupaten Lamandau Tahun 2015

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Puskesmas Bulik	-	2	1
2.	Puskesmas Arga Mulya	-	1	-
3.	Puskesmas Tapin Bini	-	2	-
4.	Puskesmas Kudangan	-	1	-
5.	Puskesmas Bukit Jaya	-	1	-
6.	Puskesmas Merambang	-	1	-
7.	Puskesmas Sematu	-	1	1
8.	Puskesmas Melata	-	2	-
9.	Puskesmas Bayat	-	1	-
10.	Puskesmas Kinipan	-	1	-
11.	Puskesmas Kawa	-	1	-
SUB TOTAL		-	14	2
12.	Rumah Sakit Umum Daerah	2	11	1
TOTAL		2	25	3

Kondisi ketersediaan tenaga dokter spesialis di RSUD Lamandau antara lain yaitu :

- Dokter spesialis anastesi
- Dokter spesialis forensik



Sedangkan jumlah paramedis yaitu bidan, sarjana keperawatan dan perawat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Jumlah Tenaga Keperawatan di Sarana Kesehatan
Kabupaten Lamandau Tahun 2016

No.	Unit Kerja	BIDAN	SARJANA KEPERAWATAN	PERAWAT
1.	Puskesmas Bulik	17	-	21
2.	Puskesmas Arga Mulya	9	-	10
3.	Puskesmas Tapin Bini	7	-	7
4.	Puskesmas Kudangan	11	-	14
5.	Puskesmas Bukit Jaya	3	-	13
6.	Puskesmas Merambang	5	-	12
7.	Puskesmas Sematu	12	-	14
8.	Puskesmas Melata	11	-	16
9.	Puskesmas Bayat	8	-	17
10.	Puskesmas Kinipan	3	-	19
11.	Puskesmas Kawa	3	-	10
SUB TOTAL		89	-	153
12.	Rumah Sakit Umum Daerah			
TOTAL		89	-	153

Sasaran Strategis 11

**Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pola hidup
sehat dan pengelolaan lingkungan Sehat**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pola Hidup sehat dan Pengelolaan lingkungan sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Angka usia harapan hidup	Persen	67,7	67,45	99,06	68,1	69,12	101,49
Capaian Kinerja					99,06			101,49



Berdasarkan tabel di atas, rata – rata capaian meningkatnya angka usia harapan hidup (UHH) **sebesar 101,49 %**, dengan kategori **Sangat berhasil** capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 2,43 % dari capaian kinerja sebesar 99,06%. Sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2016 telah memenuhi target. Tercapainya indikator ini disebabkan oleh :

- Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Lamandau meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Petugas kesehatan telah secara rutin melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan kesehatan, salah satunya berupa penyuluhan dan pemantauan kesehatan ke masyarakat dan lingkungannya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan yang sehat.
- Masyarakat telah sadar akan pentingnya pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta telah sadar memeriksakan kesehatannya secara berkala ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain :

1. Program obat dan pebekalan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program promosi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program perbaikan gizi masyarakat.
5. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya.
6. Program peningkatan dan keselamatan ibu dan anak.



Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Pembinaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembinaan Kesetaraan Gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana” dengan 3 (tiga) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	26	23,75	91,35	30	23,37	77,90
2.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	3	1,8	60	1	1,8	180
3.	Rasio Aseptor KB	persen	55	13.476	103,66	60	78	130
Capaian Kinerja					85,00			129,30

Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran meningkatnya Pembinaan kesetaraan gender perlindungan anak dan keluarga berencana **sebesar 129,30%**, dengan kategori **Sangat berhasil**. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 44,30% dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) dari capaian kinerja sebesar 85,00%. Dari 3 (tiga) Indikator Sasaran meningkatnya Pembinaan kesetaraan gender perlindungan anak dan keluarga berencana terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaiannya melebihi target pada tahun 2016 yaitu Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur sebesar 180,00% dan Rasio Aseptor KB sebesar 130,00%, selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang tingkat capaian kinerja belum maksimal (dibawah 100%) yaitu indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 77,90%.

Pemenuhan capaian kinerja kurang optimal pada umumnya disebabkan yaitu:

- Kabupaten Lamandau adalah daerah yang sedang berkembang hal ini menjadi magnet bagi pencari kerja, kondisi seperti ini akan sangat terlihat pada saat ada formasi CPNS banyak pencari kerja dari daerah lain yang



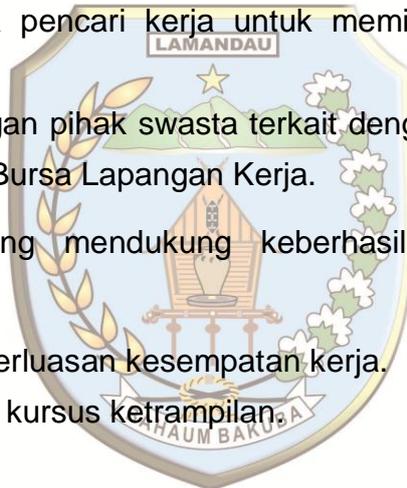
- mendaftar sebagai pencari kerja di Kabupaten Lamandau, yang tentunya itu sangat mempengaruhi angkatan kerja, dan ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Lamandau;
- Belum tentu yang mencari pekerjaan adalah pengangguran, karena bisa jadi pencari kerja yangn terdaftar sebagai pencari pencari kerja untuk pindah pekerjaan, seperti contoh pada saat formasi CPNS banyak yang mendaftar tetapi sebenarnya sudah bekerja di perusahaan swasta.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang lebih bervariasi dalam arti tidak sama dengan lowongan pekerjaan yang sudah ditawarkan sebelumnya.
2. Mengarahkan para pencari kerja untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.
3. Berkerjasama dengan pihak swasta terkait dengan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan membuka Bursa Lapangan Kerja.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain :

1. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
2. Program Pelatihan/ kursus ketrampilan.



Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, Berbangsa dan Bernegara

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.

Tabel 3.25
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Presentase penegakan atas pelanggaran	Tahun	100	99,46	99,46	100	97,20	97,20



No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Perda dan Perkada							
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	Tahun	100	99,00	99,00	100	98,75	98,75
Capaian Kinerja					99,23			97,98

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, Berbangsa dan Bernegara sebesar 97,98%, dengan kategori **berhasil**. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,26% dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) dari capaian kinerja sebesar 99,23%, Secara umum capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut menghasilkan tingkat capaian yang optimal namun masih dibawah target (dibawah 100%).

Kurang optimalnya capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah:

1. Indikator Presentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perkada tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 97,98%, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,26% dari capaian kinerja sebesar 99,23% , tidak optimalnya indikator ini disebabkan karena :
 - Kurangnya Personil Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Kurangnya sosialisasi SKPD terkait tentang Perda.
 - Kurangnya Koordinasi antar SKPD terkait dalam penegakan Perda.
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penegakan Perda;
2. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 98,75%, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,25% dari capaian kinerja sebesar 99,00%, tidak optimalnya indikator ini disebabkan karena :
 - Keterbatasan terhadap ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

Upaya untuk meningkatkan kinerja ini melalui Program/Kegiatan yang antara lain:

- Berangsur-angsur untuk memenuhi jumlah tenaga Satpol PP sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Program peningkatan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan kegiatan Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak lanjut kriminal dengan kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
- Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi.

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Pembinaan kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembinaan kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana” dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	orang	86,5	41	47,39	76,9	68	88,42
2.	Tingkat waktu tanggap respon time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Keg	75	75	100	80	70	87,50
Capaian Kinerja					147,39		87,96	



Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian “Meningkatnya Pembinaan kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana” sebesar **87,96%** dengan kategori “**berhasil**”, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan capaian indikator kinerja Jumlah “Penangan Penyandang Kesejahteraan Sosial” tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 59,43 % dari capaian kinerja sebesar 147,39%.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain :

- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- Bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga miskin.
- Pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan bantuan KUBE.
- Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Nilai Jiwa dan Kebangsaan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Jiwa dan Kebangsaan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.27

Evaluasi Pencapaian Sasaran 15

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	23	23	100	24	23	100
Capaian Kinerja					100			95,83

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian “Meningkatnya Nilai Jiwa dan Kebangsaan Masyarakat” sebesar **95,83%** dengan kategori “**berhasil**”, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan capaian indikator kinerja Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 100% dari capaian kinerja sebesar 100%, namun dari target yang ditetapkan tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut antara lain berupa Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan seperti :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- Posialisasi kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan bela negara dalam menegakkan ideologi negara.
- Ikrar Bersama Anak Bangsa.
- Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Sasaran Strategis 16 Tersedianya Infrastruktur yang Handal dan terintegrasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Tersedianya Infrastruktur yang Handal dan terintegrasi” dengan 3 (tiga) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	448,75	408,13	89,39	468,75	317,874	67,81
2.	Jumlah Terminal Angkutan Darat	Jumlah	1	1	100,00	1	1	100
3.	Angkutan Darat	Buah	28.194	31.999	113,49	28.194	35.020	124,21
Capaian Kinerja					100,98			74,74

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi sebesar 74,74%, dengan kategori **berhasil**. Dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan penurunan sebesar 26,24% dari capaian indikator sebesar 100,98%. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya melampaui target yaitu indikator Angkutan Darat dengan capaian 124,21%, 1 (satu) indikator Jumlah Terminal Angkutan Darat capaiannya memenuhi target dengan capaian 100% sedangkan 1 (satu)



indikator lainnya tingkat capaian kinerja belum optimal atau dibawah 100% yaitu panjang jalan dalam kondisi baik (>40 km/jam) dengan capaian 67,81%.

Ketidakberhasilan capaian indikator kinerja adalah Indikator Panjang jalan dalam kondisi baik (>40 km/jam) tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 67,81%, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2009-2013) capaian indikator kinerja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 26,24% dari capaian kinerja sebesar 100,98%, tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena :

- Dalam pelaksanaan pembangunan kebina margaan terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan sarana jalan dan jembatan tidak bisa secara optimal.
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan adanya keterlambatan pekerjaan serta berakhirnya jatuh tempo waktu pelaksanaan paket pekerjaan dari pihak penyedia/ pelaksana pekerjaan, dalam hal ini pihak kedua yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

Program/ Kegiatan yang menunjang dan meningkatkan pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

- Panjang Jalan dilalui roda empat melalui Program pembangunan jalan lingkungan dan Pembangunan jalan lingkungan perkotaan.
- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) melalui Program pembangunan jalan dan jembatan.
- Program peningkatan jalan.
 - 1) Peningkatan jalan kabupaten.
 - 2) Peningkatan jalan dalam kota di 7 kecamatan.
 - 3) Peningkatan jalan dalam Ibukota Kabupaten.
- Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan.

Pencapaian target sasaran capaian tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian
----	-------------------	--------	---------



			Target	Realisasi s.d. Tahun 2015	Capaian Kinerja (%)
1	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	468,75	317,874	67,81
2	Jumlah Terminal Angkutan Darat	Jumlah	1	1	100
3	Jumlah Angkutan Darat	buah	28.194	35.020	124,21

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah mendekati target yang ditetapkan karena capaian kinerja 3 (tiga) indikator hanya 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya melebihi target yaitu indikator Jumlah Angkutan Darat, 1 (satu) indikator yang tingkat capaiannya belum optimal yaitu indikator Panjang jalan dalam kondisi baik (>40 km/jam) capaian kinerja sebesar 67,81% dan 1 (satu) indikator Jumlah Terminal Angkutan Darat capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.30
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,46	1:1,42	106,05	1:1,45	1:1,22	119,32
Capaian Kinerja					106,05			119,32

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian tersedianya Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman sebesar 119,32%, dengan kategori **sangat berhasil**. Dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan peningkatan sebesar 13,27% dari capaian indikator sebesar 106,05%. indikator kinerja sasaran tersebut melampaui target menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menunjukkan upaya yang maksimal untuk mencukupi ketersediaan rumah yang layak huni dengan bagi masyarakat.



Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain program pengembangan perumahan berupa kegiatan :

- Fasilitasi/stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
- Pembangunan mess desa se- Kabupaten Lamandau.

Pencapaian target sasaran capaian tersedianya Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Capaian s.d Tahun 2015	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,45	1:1,22	119,32

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 menunjukkan hasil yang optimal dengan capaian kinerja melampaui target sebesar 119,32 %, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menunjukkan upaya yang optimal untuk mencukupi ketersediaan rumah yang layak huni dengan bagi masyarakat.

Sasaran Strategis 18
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Penunjang Pembangunan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan" dengan 3 (tiga) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.32
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	50	50	100	52,5	52,5	100
2.	Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	35,87	75,35	70,67	38,74	25,35	65,90
3.	Rumah Tangga	Persen	39,13	31,84	81,37	41,16	31,84	75,52



No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	bersanitasi							
Capaian Kinerja					84,01			80,47

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sebesar 80,47 %, dengan kategori **berhasil**, dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan penurunan sebesar 3,54% dari capaian indikator sebesar 84,01%. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) indikator yang capaiannya sesuai target yaitu indikator rumah tangga pengguna listrik, dengan capaian sebesar 100%, masih terdapat 2 (dua) indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi yang tingkat capaian indikatornya tidak memenuhi target (dibawah 100%).

Ketidakberhasilan capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah :

1. Indikator Rumah tangga pengguna air bersih dari indikator ini tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 65,90%, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,77% dari capaian kinerja sebesar 70,67%, tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan kegiatan tidak bisa secara optimal.
2. Indikator Rumah tangga bersanitasi dari indikator ini tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 75,52%, dibandingkan tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) capaian indikator kinerja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,85% dari capaian kinerja sebesar 81,37%, tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan kegiatan tidak bisa secara optimal.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut diatas akan dilakukan sesuai dengan target tersebut dan melakukan penyesuaian target pada RPJMD 2013-2018 dengan melihat ketersediaan dana.



Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain :

- Program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan Peningkatan distribusi penyediaan air baku.
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan pembangunan sistem air limbah komunal berbasis masyarakat.
- Program pembangunan/ peningkatan sarana air bersih perdesaan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan.
- Program pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih Ibukota kecamatan dengan kegiatan peningkatan kapasitas air bersih perkotaan.

Pencapaian target sasaran capaian meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Realisasi s.d Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	52,5	52,5	100
2	Rumah Tangga pengguna air bersih	%	38,74	25,35	65,90
3	Rumah Tangga bersanitasi	%	41,16	31,84	75,52

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah mendekati target yang ditetapkan karena 3 (tiga) indikator menunjukkan capaian berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan listrik, air bersih dan rumah tangga bersanitasi.



Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Partisipasi Swasta/ Pihak Ketiga Untuk Pengadaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Partisipasi Swasta/ Pihak Ketiga Untuk Pengadaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.34
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Partisipasi swasta dalam pembangunan	Persen	81	81	100	82	82	100
Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatkan partisipasi swasta/ pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar 100%, dengan kategori **Berhasil**, dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan tingkat capaian yang sama sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran tersebut memenuhi target yaitu sebesar 100%, kondisi ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Program/Kegiatan ini terlaksana atas bantuan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau sebagai bentuk apresiasi, guna menunjang pembangunan infrastruktur daerah yang ada di Kabupaten Lamandau.

Sasaran Strategis 20

Terwujudnya Perlindungan Fungsi Ruang Dan Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Perlindungan Fungsi Ruang Dan Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.35
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	persen	94	94	100	19	16	84,21
Capaian Kinerja					100			84,21

Berdasarkan tabel diatas, rata - rata capaian sasaran terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang sebesar 84,21%, dengan kategori **berhasil**, dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan penurunan sebesar 15,79% dari capaian sebesar 100%.

Pencapaian target sasaran terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Persen	19	16	84,21

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah memenuhi target yang ditetapkan dilihat dari capaian indikator yaitu indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

Sasaran Strategis 21 **Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Pengembangan** **Adat Dan Budaya Lokal**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Pengembangan adat dan Budaya Lokal” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.37
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Festival seni dan Budaya	Kegiatan	11	4	36,36	13	4	30,76
Capaian Kinerja					36,36			30,76

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Upaya Pelestarian dan Pengembangan adat dan Budaya Lokal sebesar 30% dengan kategori **kurang berhasil**. dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan penurunan sebesar 6,36% dari Capaian kinerja 36,36% dari target yang ditetapkan 13 kegiatan terealisasi 4 kegiatan.

Sasaran Strategis 22

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal” dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.38.
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumah Kegiatan Olah Raga	Kegiatan	34	4	11,76	36	8	22,22
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	10	10	100	8	0	0
Capaian Kinerja					55,88			22,22

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal** sebesar 22,22% dengan kategori **kurang berhasil**. dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukkan penurunan kinerja sebesar 33,66% dari capaian indikator tahun 2015 sebesar 55,88%. Capaian



kinerja 2 (dua) indikator sasaran belum optimal dilihat dari jumlah capaian kinerja dibawah 100%.

Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.39
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Peningkatan Nilai LAKIP (Indek)	Kegiatan	36	30	83,33	36	30	89,33
Capaian Kinerja					83,33			89,33

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 89,33 % dengan kategori **cukup berhasil**. dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2015 (RPJM 2013-2018) menunjukan peningkatan sebesar 6% dari capaian sebesar 83,33%.

Capaian indikator indikator sasaran tersebut menunjukan hasil capaian yang belum optimal dilihat dari jumlah capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja ini menunjukan upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan/ bimtek penyusunan LAKIP pada masing-masing SKPD.

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.40
Evaluasi Pencapaian Sasaran 24

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Peningkatan opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah" adalah sebesar 100% dengan kategori capaian **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Program/ Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis 25

Meningkatnya Kualitas Sumberdaya aparatur pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Sumberdaya aparatur pemerintah daerah" dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.41
Evaluasi Pencapaian Sasaran 25

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Golongan dan Jabatan yang sesuai	orang	265	494	186,41	323	480	148,61
Capaian kinerja					186,41			148,61

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kualitas Sumber daya aparatur pemerintah daerah" adalah sebesar 148,61% dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**. Indikator tersebut tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran tahun 2015 (RPJM 2013-2018) Keberhasilan



pencahayaan indikator ini menunjukkan Keseriusan Pemerintah dalam menempatkan pegawai berdasarkan golongan dan jabatan. yaitu melaksanakan kegiatan penempatan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan melakukan mutasi pegawai melalui pelantikan pejabat struktural dengan berpedoman azas *the right man on the right place* dengan mengacu pada standar kompetensi pegawai.

Sasaran Strategis 26

Meningkatnya Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.42
Evaluasi Pencapaian Sasaran 26

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	72	78,12	108,50	76	78,16	102,84
Capaian Kinerja					108,50			102,84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat” adalah sebesar 102,84% dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**. Dibandingkan Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 (RPJM 2013-2018) mengalami penurunan sebesar 5,66% dari capaian sebesar 108,50%. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan Pelayanan pengurusan perijinan memenuhi Standar Pelayanan yang ditetapkan. Keberhasilan capaian indikator kinerja pada tahun 2016 disebabkan adanya Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini antara lain:

- Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dengan Kegiatan Survei Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Program Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan (Insentif Pelayanan Perijinan)



- Pemberian tambahan tunjangan kepada pelayanan perijinan (insentif)

Sasaran Strategis 27

Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis,
rukun dan damai di kalangan Umat Beragama

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama dengan indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.43
Evaluasi Pencapaian Sasaran 27

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Kriminalitas	Kasus	0	0	100	0	0	100
Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama **sebesar** 100.%, dengan kategori **berhasil** dari capaian tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sama sebesar 100%. Dilihat dari tingkat capaian kinerja tahun 2015 tingkat capaian indikator ini memenuhi target dengan capaian 100 %.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran adalah :

- Sosialisasi Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.
- Pembinaan Mental Spiritual.
- Bimbingan Penyuluhan Remaja Masjid dan Gereja.

Pencapaian target sasaran capaian terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Kriminalitas	Kasus	90	0	190



Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan karena capaian kinerja indikator adalah 190%.

Realisasi capaian indikator makro daerah terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama adalah 190%.

Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peribadatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan dengan indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.45
Evaluasi Pencapaian Sasaran 28

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan rumah ibadah dalam kondisi baik	Jumlah	260	215	83,00	264	347	131
Capaian Kinerja					125		131	

Berdasarkan tabel diatas meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan **sebesar 131,00 %**, dengan kategori **Sangat berhasil**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 125 % kinerja capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6%. Dilihat dari tingkat capaian kinerja tahun 2015 tingkat capaian indikator ini tidak memenuhi target dengan capaian 131,00 %.

Pencapaian target sasaran capaian meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Progran dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran adalah :

- Adanya program bantuan untuk pembangunan tempat ibadah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tempat ibadah



Pencapaian target sasaran capaian terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama juga memperlihatkan capaian indikator makro daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Pencapaian Indikator Makro Daerah Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian		
			Target	Tahun 2015	Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan rumah ibadah dalam kondisi baik	Jumlah	264	347	131,00

Realisasi capaian indikator makro daerah tahun 2016 secara keseluruhan telah mendekati target yang ditetapkan karena capaian kinerja indikator adalah 131%. Pencapaian kinerja ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memenuhi untuk memenuhi sarana peribadatan bagi para pemeluk agama.

Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pariwisata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pariwisata” memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.47
Evaluasi Pencapaian Sasaran 29

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDBR	persen	1,5	1,5	100	2	1,5	75
Capaian Kinerja					100			75

Berdasarkan tabel diatas meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Bidang Pariwisata sebesar **75%**, dengan kategori **berhasil**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun



2015 (RPJMD 2013-2018) sebesar 100% kinerja capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 25% dari capaian tahun 2015.

Dilihat dari tingkat capaian kinerja tahun 2016 perlu pengembangan dibidang pariwisata yang menunjang sektor pariwisata seperti :

- Pelaksanaan *event festival* 1000 Bukung.
- Pelaksanaan *event* promosi pariwisata ke luar daerah berupa pameran dan expo pariwisata sebanyak 3 kali.
- Pengelola objek wisata Riam Tapin Bini.
- Beroperasionalnya 4 (empat) lembaga keuangan berupa Bank Pembangunan Kalteng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia.
- Jumlah penginapan yang telah beroperasional sebanyak 9 (Sembilan) hotel/ losmen, yang terdiri dari :

1. Hotel Ezie Purnama.
2. Losmen Samudra.
3. Hotel Putri Tunggal.
4. Hotel Rifki Safari.
5. Losmen Tiga Saudara.
6. Losmen Mamamia.
7. Losmen Lamandau.
8. Losmen Tita.
9. Losmen di kecamatan Delang



Sasaran Strategis 30 Meningkatnya Jumlah Wisatawan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Jumlah Wisatawan” memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.48
Evaluasi Pencapaian Sasaran 30

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2016		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	Orang	55	145	96,67	65	413	635
Capaian Kinerja					96,67			635



Berdasarkan tabel diatas capaian indikator sasaran Meningkatnya Jumlah Wisatawan sebesar **635 %**, dengan kategori **sangat berhasil**. Dibandingkan dengan capaian Indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) mengalami peningkatan sebesar 538,33% dari capaian sebesar 96,67 %.

Capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan hasil yang sudah optimal dengan melebihi target sebesar 65 %.

Tercapainya target ini lebih banyak disebabkan sudah optimalnya pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada seperti Riam Tapin Bini, Riang Setengah, Bukit Sampuraga, Batu Batungkat, Air terjun Curuk SP 5 dan situs rumah betang di Rumbang Bulin Bakonsu.

Untuk lebih meningkat kinerja ini dilakukan melalui program/kegiatan :

- Promosi wisata.
- Mengikuti Even Kegiatan Kepariwisataaan.
- Membangun akses menuju lokasi wisata.
- Menjalin kerjasama dengan Agen Perjalanan / tour wisata.



Sasaran Strategis 31
Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.49
Evaluasi Pencapaian Sasaran 31

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015 (RPJMD 2013-2018)		Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tersedianya data kualitas air sungai dan mutu air	Sungai	80	92,18	115	80	80	100
Capaian Kinerja					115			100



Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebesar **100%** dengan kategori **sangat berhasil**. Dibandingkan dengan capaian Indikator kinerja tahun 2015 (RPJMD 2013-2018) mengalami penurunan sebesar 15% dari capaian sebesar 100 %.

Program yang mendukung keberhasilan indikator tersebut antara lain:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
2. Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup.

A. BELANJA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Adapun anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Lamandau setelah perubahan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 980.400.304.956,00 terealisasi Rp. 898.825.200.357,44 atau sebesar 91,67% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 376.187.064.365,00 terealisasi Rp. 348.353.450.358,00 atau 92,60% dengan proporsi 52% dari total realisasi dan belanja langsung sebesar Rp.

604.213.240.591,00 terealisasi Rp. 550.471.749.999,44 atau 91,11% dengan proporsi 52% dari total realisasi. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja



langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2016 :

Tabel 3.50
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Lamandau Tahun 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Proporsi (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	376.187.064.365,00	348.353.450.358,00	92,60	52
5.1.1	Belanja Pegawai	265.976.859.376,00	241.982.575.490,00	90,98	52
5.1.4	Belanja Hibah	16.494.289.000,00	14.439.498.000,00	87,54	53
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.337.600.000,00	1.696.633.250,00	72,58	58
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes	1.354.376.621,00	1.074.967.235,00	79,37	56
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes	89.483.777.192,00	89.159.776.383,00	99,64	50
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	540.162.176,00	-	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	604.213.240.591,00	550.471.749.999,44	91,11	52
5.2.1	Belanja Pegawai	55.312.621.187,00	49.039.179.940,00	88,66	53
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.496.550.233,00	170.377.090.345,12	88,97	53
5.2.3	Belanja Modal	357.404.069.171,00	331.055.479.714,32	92,63	52

B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin meningkat.

1. Kebijakan Umum

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.



SILPA mencakup pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, SILPA Tahun Anggaran 2015 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta pembiayaan kegiatan prioritas daerah.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah, serta penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya.

Kondisi umum pembiayaan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 dari sisi penerimaan baru bersumber pada jenis penerimaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lamandau belum melakukan kebijakan lain yang merupakan sumber pembiayaan. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan masih untuk membayar pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (Investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya.

2. Realisasi

Pembiayaan pada tahun 2016 untuk Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 125.983.907.771,- dan terealisasi 100% dari target. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 7.230.000.000,00,- dan terealisasi 100% dari target. maka Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 106.253.907.771,00,- (Penerimaan Daerah sebesar Rp. 125.983.907.771,00,- dikurangi dengan Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 7.230.000.000,00,- sehingga masih ada SILPA Tahun Berkenaan sebesar Rp.



118.753.907.771,00,-) Adapun rincian Pembiayaan Daerah dan realisasi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamandau tahun 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
6.1	PENERIMAAN	125.983.907.771,00	125.983.907.771,00	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	125.983.907.771,00	125.983.907.771,00	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	125.983.907.771,00	125.983.907.771,00	100,00
6.2	PENGELUARAN	19.730.000.000,00	12.230.000.000,00	62,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	5.000.000.000,00	40,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	7.230.000.000,00	7.230.000.000,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	19.730.000.000,00	19.730.000.000,00	60,00
	Pembiayaan Netto	106.253.907.771,00	12.230.000.000,00	12,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	78.189.754.591,00	15.410.109.354,08	20,00



*Lamandau
Terseenyum*



BAB IV PENUTUP

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lamandau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 31 (Tiga puluh satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 telah dapat direalisasikan dengan capaian kinerja **116,01%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 31 (tiga puluh satu) yang merupakan IKU, dapat disimpulkan bahwa sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil 22 (Dua Puluh Dua) sasaran, tercapai dengan predikat Berhasil 5 (Lima) sasaran dan tercapai dengan predikat Tidak Berhasil 4 (Empat) sasaran.

Dengan demikian masih terdapat beberapa IKU yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan, yang masuk dalam kategori Tidak Berhasil sehingga perlu perhatian tindak lanjut penanganan pada tahun-tahun mendatang. Sasaran strategis yang masuk dalam kategori tidak berhasil yaitu :



1. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.;
2. Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara ;
3. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal; dan
4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dari 31 (tiga puluh satu) sasaran tersebut ditetapkan 61 (Enam Puluh Satu) indikator kinerja yang diklasifikasikan sebagai berikut menurut kategori tingkat keberhasilannya yaitu 42 (Empat Puluh Dua) indikator sangat berhasil, 9 (Sembilan) indikator berhasil, 3 (tiga) indikator cukup berhasil dan 7 (Tujuh) indikator tidak berhasil. Berikut indikator-indikator kinerja yang berkategori tidak berhasil :

1. Ketersediaan Daging;
2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan;
3. Jumlah Organisasi Pemuda;
4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
5. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya;
6. Jumlah Kegiatan Olah raga; dan
7. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya;

Didasari masih banyaknya indikator kinerja sasaran yang pelaksanaannya masih belum memenuhi target menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur pemerintah pada tahun berikutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengingatkan kepada masing-masing SKPD terkait dengan tidak terpenuhinya capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan melakukan revisi target kinerja tahun berikutnya untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan pemenuhan dana.
2. Melakukan Revisi terkait dengan indikator kinerja yang belum dapat diukur karena realisasi dari indikator tersebut menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini terdapat beberapa masalah pokok yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LKIP berikutnya, sebagai berikut :



1. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan dengan target tahun berjalan.
2. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
3. Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD periode berikutnya harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan sesuai dengan isu-isu strategis sehingga indikator-indikator kinerja yang ditetapkan terukur dan akurat.

Hal-hal yang perlu dilakukan terkait kualitas perencanaan dalam pencapaian sasaran di tahun-tahun berikutnya adalah:

1. Rencana kerja berikut indikator kerjanya harus disusun lebih baik dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan riil sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat. Indikator kinerja harus dibuat secara jelas, relevan, disertai target capaian yang terukur.
2. Perlunya setiap SKPD untuk menyiapkan staf yang kompeten dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, sehingga kualitas penyusunan perencanaan dan akuntabilitas akan lebih baik. Selain dapat mengakomodir perubahan peraturan tentang pedoman penyusunan LKIP staf dimaksud perlu untuk mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis.
3. Terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target karena penetapan target yang cukup tinggi selain itu pada tahun 2016 tidak dilaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator tersebut karena keterbatasan anggaran.

Akhirnya dengan disusun LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*.



*Lamandau
Tersenyum*



LAMPIRAN

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016



PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan				
		Karet	ton/ha/tahun	1,60 ton/ha/thn	1,42	89,00
		Kelapa Sawit	ton/ha/tahun	23 ton/ha/thn	21	91,00
		Jengkol	ton/tahun	180 ton/ha/thn	173	96,11
		Kopi	ton/ha/tahun	0,4 ton/ha/thn	0,28	70,00
		Gaharu	ton/ha/tahun	0,3 ton/ha/thn	0,17	56,66
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama				
		Beras	Ton/Tahun	18.647,82 ton/thn	17.400	93,31
		Daging	Ton/Tahun	795,55 ton/thn	97,32	12,23
		Telur	Kg/Tahun	4.057 kg/thn	169.397	422,80
		Ikan	Ton/Tahun	2.013,38 ton/thn	2.265,99	122,55
3.	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Persentasi koperasi aktif	Unit	88	80	90,00
		Usaha Mikro dan kecil	UMK	2000	3.058	152,00



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	22	32	145,45
		Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	2.374 Trilyun	5.103	214,90
5.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Jumlah Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	54.863	38.675	70,49
		Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	3,91	4,00	102,00
6.	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	Angka Partisipasi Murni				
		SD/MI	%	100	87,79	87,79
		SMP/MTS	%	100	76,17	76,17
		SMA/SMK/MA	%	50,32	76,51	152,02
		Angka Partisipasi Kasar				
		SD/MI	%	118,82	100,47	84,56
		SMP/MTS	%	109,79	102,20	93,09
		SMA/SMK/MA	%	65,60	81,67	124,50
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,3	8,1	97,59
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	70,40	75,38	107,07		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Rasio Guru terhadap murid				
		SD/MI	Rasio	1 : 19	1 : 14	135,71
		SMP/MTS	Rasio	1 : 20	1 : 12	166,67
		SMA/SMK/MA	Rasio	1 : 19	1 : 15	126,67
7.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	kegiatan	13	7	53,85
8.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Kasus Narkoba	%	1	0,011	110,00
9.	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Jumlah organisasi Kepemudaan	organisasi	24	11	45,83
10.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,39	0,20	51,28
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Rasio	2,11	1,79	84,83



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
11.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Angka Usia Harapan Hidup	%	68,1	69,12	101,49
12.	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	30	23,37	77,90
		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	1	1,8	180
		Rasio Aseptor KB	persen	60	78	130
13.	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	Presentase penegakan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Tahun	100	97,20	97,20
		Kasus kriminalitas yang ditindaklanjuti	Tahun	100	98,75	98,75
14.	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	Jumlah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	orang	76,9	68	88,42
		Tingkat waktu tanggap respon time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Keg	80	70	87,50
15.	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	24	23	100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
16.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	468,75	317,874	67,81
		Jumlah Terminal Angkutan Darat	Km	1	1	100
		Angkutan Darat	%	28.194	35.020	124,21
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,45	1:1,22	119,32
18.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	52,5	52,5	100
		Rumah Tangga pengguna air bersih	%	38,74	25,35	65,90
		Rumah Tangga bersanitasi	%	41,16	31,84	75,52
19.	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Partisipasi swasta dalam pembangunan	%	82	82	100
20.	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Rasio	19	16	84,21



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
21.	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Jumlah Festival seni dan Budaya	Kegiatan	13	4	30,76
22.	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Jumah Kegiatan Olah Raga	Kegiatan	36	8	22,22
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	8	0	0
23.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Nilai LAKIP (Indek)	Kegiatan	36	30	89,33
24.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Penigkatan opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
25.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Golongan dan Jabatan yang sesuai	Orang	323	480	148,61
26.	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76	78,16	102,84



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
27.	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Angka Kriminalitas	Kasus	0	0	100
28.	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Cakupan rumah ibadah dalam kondisi baik	Jumlah	264	347	131
29.	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDBR	Usaha	2	1,5	75
30.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	Kegiatan	65	413	635
31.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Tersedianya data kualitas air sungai dan mutu air	Sungai	80	80	100